

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung

4.1.1 Sekilas tentang Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 03/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964.

Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta warna corak kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah ada budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Tatkala Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651 – 1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan

Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji disertai tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten.

Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya, pada tanggal 07 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.

Pada tanggal 29 Agustus 1682, iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten.

Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC

dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung begitu saja tunduk kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.

Sementara itu, timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut “Jenang” atau kadang-kadang Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada). Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut “Adipati” secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan Jenang/Gubernur. Jadi, penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten – Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Selanjutnya, pada masa Raffles berkuasa (1811) ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung. Pada masa itu pula (1817), posisi Radin Inten semakin kuat dan oleh karenanya Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan :

1. Radin Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun;
2. Kedua saudara Radin Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f. 600 tiap tahun;
3. Radin Inten tidak diperkenankan memperluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan tersebut tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Oleh sebab itu, pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Leliever dan anak buahnya. Akan tetapi pada saat itu Belanda sedang menghadapi Perang Diponegoro (1825 – 1830), maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu.

Tahun 1825, Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Radin Imba Kusuma. Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai. Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Radin Imba Kusuma di buang ke Pulau Timor.

Secara bersamaan, pada masa itu rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan, “Jalan Halus” dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Radin Imba Kusuma sendiri yang bernama Radin Inten II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Radin Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.

Sejak itu, Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Terkait dengan kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang.

Hingga menjelang Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}45'$ sampai $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Daerah Provinsi Lampung meliputi

areal 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
- Di sebelah selatan dengan Selat Sunda;
- Di sebelah timur dengan Laut Jawa;
- Di sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Posisi tersebut menempatkan Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang antara pulau Jawa dan Sumatera. Letaknya yang strategis, menjadikan Daerah ini sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Provinsi Lampung, beribukota di Bandar Lampung yang memiliki luas 192,2 km². Selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

Sejak tahun 1999, wilayah Provinsi Lampung telah dimekarkan menjadi 14 daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat sebesar 7.289.767 jiwa. Selama tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,98%; dan pada tahun 2000-2006 mengalami penurunan menjadi 0,84%. Pada tahun 2005 terdapat 86 Desa, 174 Kelurahan, dan 180 Kecamatan, sedangkan tahun 2008 terdapat 2.153 Desa, 174 Kelurahan, dan 204 Kecamatan¹¹⁹. Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Lampung meliputi :

¹¹⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2010 – 2015.

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa;
2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung;
3. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukota Sukadana;
4. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukota Gunung Sugih;
5. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukota Kotabumi;
6. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu;
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala;
8. Kota Bandar Lampung;
9. Kota Metro;
10. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukota Kalianda;
11. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan;
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukota Panaragan;
13. Kabupaten Mesuji dengan Ibukota Mesuji;
14. Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Pringsewu;

4.1.2 Potensi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi daerah yang besar dalam skala regional, nasional bahkan nasional. Analisis potensi Provinsi Lampung berikut, yang mendukung antara lain adalah (1) lokasi geografis yang sangat strategis, (2) kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan nasional dan regional, (3) pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, (4) keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*), dan (5) dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Provinsi Lampung.

4.1.2.1 Lokasi yang Strategis

Provinsi Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis. Dari segi jarak, kedudukan kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung terhadap kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabodetabek, Banten, serta Jawa Barat menjadikannya salah satu pilihan bagi relokasi dan tempat limpahan kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Provinsi Lampung menjadi bagian dari poros pertumbuhan Pantai Utara Jawa dan bagian dari proses perkembangan Pulau Jawa bagian barat.

Dalam kedudukannya kini, Provinsi Lampung menjadi salah satu unggulan untuk menjadi pusat pertumbuhan Sumatera bagian selatan. Lokasinya di ujung selatan Pulau Sumatera akan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang utama Pulau Jawa dengan Sumatera.

Kedudukan Provinsi Lampung pada posisi geografis yang strategis ini didukung pula oleh aksesibilitas yang tinggi. Provinsi Lampung dapat dicapai melalui jalan raya Trans Sumatera, transportasi laut melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, serta jalur udara melalui Bandar Udara Radin Inten II yang berjarak lebih kurang 18 km dari ibukota provinsi. Provinsi Lampung pun memiliki posisi yang menguntungkan terhadap obyek dan daya tarik wisata nasional maupun internasional, seperti Gunung Krakatau, Pelatihan Gajah Way Kambas dan lain sebagainya.

4.1.2.2 Kedudukan dalam Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dan regional menetapkan Provinsi Lampung sebagai pusat pertumbuhan nasional dan merupakan orientasi bagi pusat pengembangan antar daerah. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi potensial, Provinsi Lampung dapat dijadikan kawasan andalan di Pulau Sumatera dengan sektor unggulan: perdagangan, jasa, akomodasi, pariwisata, industri kerajinan, agroindustri, dan industri manufaktur, transportasi selain sebagai pusat aktivitas pemerintahan.

Berbagai kebijaksanaan di atas, mempertimbangkan kedudukan Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang pergerakan roda ekonomi dari dan ke Pulau Jawa yang didukung dengan adanya jalur lintas Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, serta rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Dalam perkembangan terakhir terungkap adanya pandangan ke depan bagi Provinsi Lampung untuk berkembang tidak sekedar sebagai *hinterland* Jakarta dan Banten, melainkan menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional melalui Kota Bandar Lampung. Hal ini selaras dengan arah kebijaksanaan penataan ruang nasional, regional dan lokal untuk Provinsi Lampung.

4.1.2.3 Potensi Alam

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 juncto Nomor 32 Tahun 2004 pasal 18 ayat 4, Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan,

sedangkan wilayah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sepertiga bagian dari wilayah provinsi. Apabila wilayah laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi. Mengacu pada perundangan tersebut, secara geografis Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai 1.105 km termasuk 69 pulau kecil dan besar (CRMP, 1998). Luas wilayah pesisir dan pantai diperkirakan $\pm 16.625,3 \text{ km}^2$ laut yang merupakan wilayah kewenangan kabupaten/kota dan provinsi.

Kota Bandar Lampung sebagai cermin Provinsi Lampung mempunyai laut dan perbukitan dengan pemandangan yang indah merupakan potensi kekayaan dan anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan benar, menjadikan kota Bandar Lampung sebagai *ecocity*, di perlukan upaya dan tahapan tindakan dalam menata kawasan pemukiman, perbukitan dan laut yang selaras dengan lingkungan alami, potensi Teluk Lampung sebagai lumbung perikanan dapat dilakukan dengan memperbaiki/memperkecil upaya-upaya merusak dan mengelola pembuangan limbah dari sungai-sungai yang masuk ke Teluk Lampung, dan dilanjutkan dengan tindakan konservasi terumbu karang yang berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan peralihan ekosistem darat dan kelautan. Luas wilayah pesisir Lampung mencapai 440.010 Ha dan berada dalam wilayah 184 desa pesisir. Secara garis besar wilayah pesisir tersebut adalah: Pesisir Barat (104.111 Ha dengan panjang garis pantai 210 km), Pesisir Timur (316.347 Ha dengan panjang garis pantai 270 km), Pesisir Teluk Lampung (48.630 Ha dengan panjang garis pantai 160 km

termasuk Selat Sunda), dan Pesisir Teluk Semangka (62.250 Ha dengan panjang garis panjang 200 km), wilayah pesisir sebesar 531.428 Ha atau mencapai 15,02 % dari seluruh wilayah Lampung.

4.1.2.4 Keanekaragaman Suku Bangsa

Salah satu ciri khas Provinsi Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera khususnya ke Provinsi Lampung, penduduk Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan keanekaragaman suku bangsanya, Lampung dikenal sebagai negeri yang *ruwa jurai* (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk membangun Provinsi Lampung, dalam arti Provinsi Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru, sehingga juga semakin mudah menerima pengaruh pembangunan bagi wilayahnya.

4.1.2.5 Dukungan Wilayah Belakang

Provinsi Lampung didukung oleh *hinterland* yang merupakan wilayah penghasil perikanan, perkebunan dan lokasi berbagai industri. Dengan wilayah 35.376.50 km², Provinsi Lampung dijuluki wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang lintas Jawa-Sumatera. Provinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolah hasil pertanian. Tanaman perkebunan telah memperlihatkan perkembangan yang berarti sehingga sebagian

diantaranya mampu menjadi salah satu pemasok produk nasional. Komoditi yang memegang peranan penting adalah gula, kelapa, lada, dan kopi robusta.

Provinsi ini segera akan menjadi daerah produsen gula terbesar di Indonesia yang mampu memasok 40% kebutuhan gula nasional, setelah berbagai daerah produsen di Pulau Jawa menghadapi keterbatasan lahan tebu. Iklim industri gula yang sehat sejak dua tahun terakhir menjadikan Lampung sebagai lumbung gula nasional, disamping produk gula tetes yang diekspor. Selain gula, Provinsi Lampung juga diharapkan mampu memasok kebutuhan daging segar. Sub sektor peternakan juga tumbuh pesat melalui pola PIR dan didukung pihak swasta melalui program kemitraan. Sub sektor perikanan juga mencatat perkembangan yang positif, terutama untuk komoditi udang yang ditenak di pertambakan.

Kegiatan industri yang terkait dengan hasil produksi pertanian selama ini relatif berkembang, dan Provinsi Lampung kini menjadi salah satu sentra agroindustri pada skala nasional, dengan kopi dan lada sebagai komoditi tradisional andalan. Namun demikian propinsi ini juga menunjukkan kecenderungan diminati oleh industri manufaktur dan kimia baik dalam rangka PMDN maupun PMA sebagai limpahan kegiatan industri di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Banten dan Jawa Barat yang semakin padat. Peran pihak swasta dalam perkembangan Provinsi Lampung terlihat dari arus investasi yang tinggi, dimana lebih dari separuhnya ditujukan untuk bidang pertanian dan agroindustri.

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,4% lebih penduduk Provinsi berada di Kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik dalam bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya.

Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke ibukota provinsi yaitu Kota Bandar Lampung. Dalam upaya mewujudkan tercapainya mekanisme sistem pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung, ada tiga jalur lintas sumatera, yaitu :

- Jalur lintas tengah, mulai pelabuhan Bakauheni—Bandar Lampung—Kotabumi dan selanjutnya ke Muara Enim;
- Jalur lintas barat, mulai dari Bandar Lampung—Kota Agung—Liwa dan selanjutnya ke Provinsi Bengkulu;
- Jalur lintas timur, mulai Pelabuhan Bakauheni—Menggala—Kayu Agung dan seterusnya hingga ke Palembang. yang semuanya melintasi Bandar Lampung.

Di samping itu, Bandar Lampung siap berfungsi sebagai *transshipment point* dari berbagai model angkutan. Hal ini didukung oleh berbagai rencana pengembangan dalam sistem transportasi regional. Rencana pembangunan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera akan memperlancar aliran pergerakan penumpang dan barang/jasa antar pulau Jawa dan Sumatera. Pelabuhan Panjang melengkapi sistem angkutan antar-model bagi seluruh Provinsi Lampung dan Sumatera Bagian Selatan. Gagasan jaringan kereta api Trans Sumatera menjadi salah

satu alternatif sarana pergerakan antar-model. Adanya rencana pembangunan jaringan jalan tol ke arah Palembang juga akan turut mendukung kelancaran aksesibilitas tersebut.

Kecenderungan perkembangan menunjukkan proses relokasi kegiatan ekonomi dari Pulau Jawa bagian Barat ke Lampung. Bahkan untuk beberapa sektor ditetapkan kebijaksanaan menjadikan Lampung sebagai basis produksi nasional. Hal ini menjadikan Provinsi Lampung potensial sebagai pusat distribusi barang dan jasa untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan.

4.1.2.6 Pusat Koleksi dan Distribusi

Dengan lokasi yang strategis secara geografis, ketersediaan akses memadai, dan jalur transportasi yang mendukung serta kelengkapan fasilitas penunjangnya, menjadikan Provinsi Lampung potensial sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai barang dan jasa.

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh wilayah belakangnya. Fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh Sumatera bagian Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, serta rencana pengembangan pelabuhan Panjang. Kelengkapan fasilitas yang tersedia juga mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada berbagai skala pelayanan.

4.1.2.7 Aksesibilitas yang Semakin Baik

Kecenderungan pergerakan Pulau Jawa—Sumatera yang memberikan indikasi peranan penting kegiatan sosial dan ekonomi keduanya menempatkan Provinsi Lampung pada posisi sentral. Sampai saat ini jumlah arus lalu lintas antara Pulau Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak—Bakauheni menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat. Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Provinsi Lampung akan menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta dan Jawa Barat serta Banten.

Untuk menampung peningkatan arus pergerakan dan mengatasi persoalan lalu lintas yang selama ini ada, pemerintah dan swasta telah merencanakan membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Mega-proyek ini sangat prospektif karena pertumbuhan aliran penumpang dan barang/jasa antar kedua pulau tersebut sangat tinggi, selama hampir satu dekade meningkat hingga 100%. Rencana pembangunan jembatan ini akan memberikan dampak pada peningkatan aksesibilitas dan berlanjut pada peningkatan aliran pergerakan orang dan barang/jasa antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Pembangunan jembatan Selat Sunda ini akan menggantikan peran transportasi laut yang selama ini dilakukan oleh kapal penyeberangan melalui pelabuhan Merak—Bakauheni. Jembatan ini direncanakan memiliki panjang 24 km dan melintasi

beberapa pulau kecil di Selat Sunda. Walaupun perspektif waktu pembangunan jembatan Selat Sunda berjangka panjang, namun rencana jembatan tersebut perlu dipertimbangkan dalam perkembangan Provinsi Lampung ke depan.

Untuk mendukung pergerakan antara pulau Jawa dan Sumatera direncanakan pembangunan prasarana transportasi darat mencakup jaringan arteri primer, jalan tol dan kereta api. Jalan tol direncanakan di bagian timur Provinsi Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa—Sumatera. Arteri primer sebagai bagian Trans Sumatera dilengkapi jalur lintas barat dan lintas timur ke Provinsi Bengkulu dan ke Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai timur. Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapi dirinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antar-pulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan sebagai gerbang internasional.

4.1.2.8 Pengembangan *Transshipment Point* akibat Perkembangan Akses

Peran Provinsi Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antar negara, terutama dalam konteks regional Sumatera Bagian Selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatera bagian

Selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas kawasan ekonomi penting yaitu Jakarta dan Banten..

Untuk mendukung peran Pelabuhan Panjang sebagai pintu gerbang ekspor-impor bagi Sumatera bagian Selatan, perlu dibangun berbagai sarana dan prasarana penunjang, diantaranya adalah pembangunan terminal peti kemas dan curah yang kompetitif terhadap Pelabuhan lainnya seperti Tanjung Priok, Bojonegara dan Palembang serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang jasa kargo.

4.1.3 Visi dan Misi Provinsi Lampung 2025

Proses perumusan visi dan misi Provinsi Lampung telah berhasil memotivasi *stakeholders* untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses perumusan visi provinsi dan penyusunan program strategis yang ingin di capai dalam mewujudkan tercapainya visi Provinsi Lampung tahun 2025 menjadi :

“Terwujudnya Lampung yang Maju, Unggul, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Visi ini dibangun dengan penuh semangat untuk membangun dan mengangkat Provinsi Lampung menjadi provinsi yang unggul dan berdaya saing dalam skala nasional dan menjadikan masyarakatnya sejahtera. Keunggulan dan berdaya saing dijadikan batu penjurur dan acuan penilaian keberhasilan pembangunan provinsi dengan indikator terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis; terwujudnya Lampung yang unggul dan berdaya saing dalam tata kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, semakin bertaqwa, berkarakter,

berpendidikan; dan tingginya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah; serta diterapkannya penegakan hukum yang berkeadilan.

Visi tersebut dibangun sebagai upaya menggerakkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta seluruh *stakeholder* di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjadikan Lampung sebagai provinsi unggulan; mengantarkan masyarakat Lampung yang sejahtera dan siap bersaing dalam pasar bebas, dengan tetap mempertahankan jatidiri daerah dan bangsa yang berkeadilan dan bertaqwa. Melalui visi itu, wawasan peningkatan daya saing dan keunggulan Provinsi Lampung serta kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat yang demokratis merupakan upaya menyeluruh (*comprehensive*) yang harus didukung seluruh *stakeholder* pembangunan. Pada akhirnya nanti, visi ini diharapkan membawa perubahan kearah kemajuan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan daerah.

4.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Bertaqwa

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan kebijakan pembangunan dengan paradigma pembangunan kualitas pendidikan, kecerdasan, kesehatan dan gizi, ketakwaan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, pelatihan, penguasaan teknologi, dan pengembangan pendidikan dan latihan yang berkewiraswastaan. Selain dari itu diarahkan pula untuk meningkatkan kualitas

kehidupan keagamaan dan kerukunan hidup beragama. Melalui misi ini akan disinerjikan semua potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat melalui keterpaduan kebijakan dan pendekatan, program kerja, dan alokasi anggaran.

4.1.3.2 Membangun dan Meningkatkan Perekonomian Daerah serta Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini ditujukan untuk membangun dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah dalam rangka memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui misi ini akan disinerjikan semua potensi dari semua pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan bank dan non bank, koperasi, dan kelembagaan dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang memiliki daya saing.

Potensi pertanian terus digali dengan mengembangkan pembangunan pertanian berbasis agribisnis, agroindustri dan kemitraan agribisnis yang sinergik dalam semua sektor pembangunan pertanian dan ekonomi. Pembangunan agribisnis dan agroindustri tetap menjadi primadona dan prioritas daerah dengan didukung mantapnya ketahanan pangan, pengembangan sektor industri perdagangan dan jasa . Kebijakan ekonomi dengan pendekatan kemitraan yang sinergik dan saling menguntungkan antara petani/masyarakat dan pengusaha seperti diungkapkan terdahulu akan terus dikembangkan untuk membangun perekonomian yang tangguh dan berdayasaing tersebut dengan melibatkan UKMK.

Misi ini ditujukan pula untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (hutan, tanah, air, fauna dan flora) secara bijaksana sehingga semua aktivitas pembangunan tidak merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung lingkungan untuk menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan misi ini sangat tergantung dari komitmen politik (kebijakan) dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, maka pendekatan yang dilakukan dimulai dari membangun kesadaran (*public awareness*); membangun komitmen, kebijakan dan perencanaan tata ruang, serta keterpaduan program pelestarian lingkungan hidup.

4.1.3.3 Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Pengembangan dan Pembangunan Wilayah serta Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan prasarana dan sarana (*infrastructure*) transportasi, pengairan, energi listrik, dan telekomunikasi, serta prasarana dasar pemukiman dan wilayah perkotaan. Infrastruktur wilayah dibangun tidak hanya berorientasi pada pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa tetapi juga di wilayah Sumatera, nasional, dan Asia Tenggara, serta pasar global. Kota-kota pertumbuhan baru dan mandiri dikembangkan seirama dengan pengembangan infrastruktur nasional seperti jalan toll Bakauheni-Terbanggi Besar, Jembatan Nusantara (Selat Sunda), jalan lintas timur (jalintim), tengah (jalinteng), dan barat (jalinbar), serta membangun infrastruktur baru sebagai akses keluar jalan lintas barat melalui pelabuhan baru ferry roro di Tanggamus menuju Merak.

Kota-kota baru dan pemukiman baru dikembangkan untuk menjadikan habitat hidup manusia Indonesia yang layak huni dan lestari lengkap dengan semua kebutuhan prasarana dasarnya. Kota-kota pertumbuhan baru tersebut adalah di Bakauheni, Sidomulyo, Tegineneng, termasuk pengembangan Kota Baru Lampung di Natar. Misi ini menunjukkan pula bahwa pengembangan infrastruktur daerah tersebut diatas dilakukan dengan kerjasama swasta dan atau BUMN ataupun investor asing dengan melibatkan perusahaan daerah, untuk menghadapi era globalisasi, membangun daya saing dan keunggulan daerah, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangunan daerah.

4.1.3.4 Mewujudkan Kinerja Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Tata Pemerintahan yang Baik)

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan dilaksanakan dengan transparan, didukung oleh aparatur dan tata pemerintahan yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif, dan berkeadilan. Dengan tercapainya hal ini, maka akan tercipta kondisi yang kondusif untuk semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen masyarakat daerah yang pada akhirnya akan semakin memantapkan *kohesivitas* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi ini merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas provinsi yang melekat untuk membangun

kesinerjian, keterpaduan, keharmonisan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk membangun hal itu akan dilakukan secara intensif kesinerjian dan keterpaduan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan ke masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam rangka mewujudkan provinsi yang unggul dan berdayasaing. Pada pelaksanaannya dilakukan kerjasama kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang harmonis antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga akan semakin cepat terwujudnya Provinsi Lampung yang berkeunggulan dan berdayasaing .

4.1.3.5 Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban serta Mendukung Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang bersih dan adil serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi semua warga masyarakat dan dunia usaha sehingga semua aktivitas sosial, ekonomi dan budaya dapat tumbuh dan berkembang secara transparan, bersih, maju, berkeadilan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4.1.3.6 Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Luhur, Seni, dan Budaya Daerah

Misi ini ditujukan untuk membangun budaya masyarakat yang berkarakter positif dan kondusif terhadap pembaharuan dan pembangunan. Arti budaya disini mencakup arti

yang luas, yaitu mencakup pola berpikir, pola bersikap, pola bertindak dan pola bermasyarakat. Melalui rekayasa budaya yang diarahkan untuk membangun karakter yang positif, maka diharapkan masyarakat Lampung akan lebih mandiri dan siap menghadapi keterbukaan dan persaingan pada era global. Melalui misi ini diharapkan: (1) terjaganya tradisi, kelestarian, dan keberagaman budaya daerah di Provinsi Lampung; (2) terjaganya ketahanan budaya daerah; dan (3) terinventarisasinya cagar budaya daerah.

4.2. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Lampung

Pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Lampung termasuk di dalamnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi provinsi didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 7.402 orang.

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I);
- b. Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan (Asisten II);
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten III);
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten IV);
- e. Biro Tata Pemerintahan Umum;
- f. Biro Otonomi Daerah;
- g. Biro Hukum;
- h. Biro Keuangan;

- i. Biro Perekonomian;
- j. Biro Administrasi Pembangunan;
- k. Biro Sosial;
- l. Biro Pemberdayaan Perempuan;
- m. Biro Mental Spiritual;
- n. Biro Umum;
- o. Biro Perlengkapan dan Aset;
- p. Biro Organisasi.

2. Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

3. Sekretariat Provinsi, terdiri atas :

- a. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);
- c. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP);
- d. Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS;
- e. Badan Penanggulangan Bencana (BPB);
- f. Badan Perlindungan Anak dan KdRT;
- g. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- h. Komisi Pemilihan Umum (KPU);

4. Dinas Daerah, terdiri atas:

Tabel 6. Struktur Organisasi Dinas Pemerintah Provinsi Lampung

No	Nama Dinas	Jumlah Pegawai (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan	307
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	74
3	Dinas Kesehatan	317
4	Dinas Sosial	207
5	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi	372
6	Dinas Perhubungan	199
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	57
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	177
9	Dinas Pekerjaan Umum	957
10	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	95
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190
12	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura	502
13	Dinas Perkebunan	324
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	102
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	129
16	Dinas Kehutanan	184
17	Dinas Pertambangan dan Energi	94
18	Dinas Pendapatan	303
	Jumlah	4.590

Sumber : BKD Provinsi Lampung, Mei 2009.

Setiap Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Di samping itu terdapat Bagian Tata Usaha yang membawahi 3-4 Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Cabang Dinas, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas-dinas tersebut di atas tidak terletak dalam satu wilayah yang merupakan suatu kompleks pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung. Instansi-instansi tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, sehingga jika mengurus perizinan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

5. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

Tabel 7. Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah/Kantor Pemerintah Provinsi Lampung

No	Nama Lembaga Teknis Daerah / Kantor	Jumlah Pegawai (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	95
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	51
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	48
4	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60
5	Badan Ketahanan Pangan	60
6	Badan Penanaman Modal Daerah	48
7	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	97
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	59
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	82
10	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung	34
11	Rumah Sakit Umum	873
12	Inspektorat Daerah	93
13	Badan Kepegawaian Daerah	74
14	Satuan Polisi Pamong Praja	70
15	Rumah Sakit Jiwa	129
	Jumlah	1.873

Sumber : BKD Provinsi Lampung, Mei 2009.

4.3. Gambaran Umum Informan

Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu:

Tabel 8. Gambaran Umum Informan

No.	Nama	Instansi	Jabatan/ Pekerjaan	Masa Kerja	Tingkat Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Masri Yahya	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sekretaris Badan	29 Tahun	S2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Belly Pahlupi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	10 Tahun	S1
3.	Marlina Jayasinga	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kasubbid Edukasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	21 Tahun	S2
4.	Ratna Meilia Sari	Biro Perekonomian	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian	24 Tahun	S2
5.	Bahrum	Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Bagian Fisik dan Prasarana	19 Tahun	S2
6.	A. Fauzi Rizal	Pemerintah Desa Gunung Batin Ilir	Kepala Desa	3 Tahun	S1
7.	Khairul Anwar Majid	Pemerintah Desa Mataram Udik	Pjs. Kepala Desa	10 Bulan	SLTA
8.	A. Tantowi Jauhari	Pemerintah Desa Mataram Ilir	Sekretaris Desa	16 Tahun	SLTP
9.	Istiahady	Pemerintah Desa Gunung Batin Udik	Sekretaris Desa	3 Tahun	SLTA
10.	Mukaram	-	Penjaga Sekretariat Desa, Masyarakat Desa Gunung Batin Ilir	4 Tahun	SD
11.	Ngadiran	-	Wiraswasta, Masyarakat Desa Mataram Udik	14 Tahun	SLTA
12.	Suhaimi	-	Wiraswasta, Masyarakat Desa Mataram Ilir	15 Tahun	SLTA
13.	Ahmad Juanda	-	Wiraswasta, Masyarakat Desa Gunung Batin Udik	2 Tahun	SLTA

Sumber : Hasil Penelitian, Desember 2010 – Maret 2011.

4.4. Gambaran Umum Perusahaan Swasta di Provinsi Lampung

Efektivitas Pemerintah Daerah sangat bergantung pada kerjasama para aktor non pemerintah dan pada penggabungan antara kapasitas negara dengan sumberdaya non pemerintah. Intinya adalah bahwa agar dapat efektif, pemerintah harus menggabungkan kapasitas mereka dengan kapasitas berbagai aktor non pemerintah, yang salah satunya adalah swasta. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang terdapat di Provinsi Lampung.

Tabel 9. Daftar Perusahaan di Provinsi Lampung.

No	Perusahaan	Alamat	Bidang Usaha	Lokasi Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acidatama Lampung Chemical Industry, PT.	Graha Kencana Building Lt.8 Jl.Perjuangan No.88 Kebon Jeruk-Jakarta Barat	Ethanol, Asam asetat	Lampung Tengah
2	Agro Putra Abadi, PT.	Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan	Perkebunan tebu : Gula rafinasi, <i>raw sugar</i> , <i>molasses</i>	Lampung Selatan dan Lampung Utara
3	Aman Jaya Perdana, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.7 Bandarlampung	PKO, PKE, CPO.	Bandarlampung
4	Andatu Lestari Plywood, PT.	Jl Raya Srengsem KM.11 Panjang-Bandarlampung	Industri kayu: <i>plywood</i> dan <i>blackboard</i>	Bandarlampung
5	Austasia Stockfeed, PT.	- Wisma Mellenia Lt.5 Jl. MT. Haryono Kav.16 Jaksel - Jl. Ir. Sutami KM.13 Tanjungbintang-Lampung Selatan	Industri pemotongan hewan, pengolahan dan pengawetan daging	Lampung Timur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Bangun Lampung Jaya, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Penambangan marmer dan pengolahannya	Lampung Selatan
7	Bangun Nusa Indah Lampung, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Perkebunan kelapa, coklat serta pengolahannya.	Tulangbawang
8	Barat Selatan Makmur Investindo, PT.	Jl. KH. A. Dahlan No.200 Pahoman-Bandarlampung	Perkebunan kelapa sawit	Tulangbawang
9	Berindo Jaya, PT.	Jl. Soekarno-Hatta Km.3,4 Way Laga Bandar Lampung	Pengolahan biji kopi	Bandarlampung
10	Budi Mutu Prima, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Industri obat nyamuk padat	Bandarlampung
11	Budi Sari Bumi, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Bihun	Bandar Lampung
12	Bumi Sumber Sari Sakti, PT.	Jl. Kebon Sirih No.39 Kebon Sirih-Jakarta Pusat	Perkebunan kelapa sawit & industri minyak kasar (minyak makan) dr nabati : perkebunan tandan buah segar, inti sawit (<i>palm kernel</i>), CPO.	Lampung Tengah
13	Charoen Pokphand Jaya Farm, PT.	Desa Bumi Agung, Kec. Tegineneng Pesawaran	Pembibitan ayam bibit untuk menghasilkan DOC bibit niaga	Pesawaran
14	Coca-Cola Bottling Indonesia, PT.	Jl. Ir Sutami KM.13,5 Lampung Selatan	Minuman bersoda	Lampung Selatan
15	Garuda Food Putra Putri Jaya, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.6 Desa Campang Raya Kec. Sukabumi	Industri makanan dari kedelai.	Bandarlampung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Great Giant Pineapple, PT.	Jl. KH. M. Salim No.28 Way Lunik Telukbetung-Bandar Lampung	Perkebunan nanas, industri pengalengan nanas, bahan pemanis, perkebunan ubi kayu, dan industri tepung tapioka.	Lampung Tengah
17	Grobest Indo Makmur, PT.	Galeri Niaga Maditerania D&G, Pantai Indak Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara	Pembenihan, pembesaran, dan pengolahan ikan dan udang	Lampung Selatan & Bandarlampung
18	Gula Putih Mataram, PT.	- Jl. Cut Mutia No.52 Bandarlampung - Bandar Mataram, Desa Mataram Udik	Perkebunan tebu : gula SHS, <i>molasses</i>	Lampung Tengah
19	Gunung Aji Jaya, PT.	da. PT. United Tractor Jl. Teuku Umar No.79 Gedung Meneng-Bandar Lampung	Perkebunan coklat dan pengolahan biji coklat	Lampung Tengah
20	Gunung Madu Plantations, PT.	Jl. Gatot Subroto No.108 Garuntang-Bandar Lampung	Perkebunan tebu : gula pasir, <i>molasses</i>	Lampung Tengah
21	Hanjung Indonesia, PT.	Jl . Soekarno-Hatta KM.11,5 Srengsem, Panjang-Bandar Lampung	Mesin peralatan pabrik kimia, alat pengangkat/ pengangkut, konstruksi baja	Bandarlampung
22	Harapan Tani Bhakti, PT.	Jl. M. Salim No.28 Way Lunik, Panjang-Bandar Lampung	Perkebunan Kelapa dan coklat : kopra; tempurung; coklat.	Lampung Tengah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Hikari Lampung Permai, PT.	Jl. KH. A. Dahlan No.20 Pahoman-Bandarlampung	Budidaya mutiara	Tanggamus
24	Indo Cafco, PT.	Jl. Ir Sutami KM.5 Kubang, Way Gubak-Bandarlampung	Ekspor barang dagangan	Bandarlampung
25	Indo Lampung Distillery, PT.	Jl. Cut Mutia No.52 Bandarlampung	Industri ethanol	Lampung Tengah
26	Indo Lampung Perkasa, PT.	Jl. Cut Mutia No.52 Bandarlampung	Perkebunan terpadu dengan industri gula: gula putih, tetes, gula murni.	Tulangbawang
27	Indofood Sukses Makmur, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.15 Desa Campang Raya Kec. Sukabumi	Industri mie instan, bumbu masak, minyak bumbu, dan <i>powder concentrate</i> .	Lampung Selatan
28	Indokom Samudra Persada, PT.	Jl Ir. Sutami KM.9 Lampung Selatan	Pengolahan udang, ikan, pabrik es, dan <i>cold storage</i>	Lampung Timur, Lampung Selatan
29	Indonesia Ethanol Industry, PT.	Graha Indramas Lt.12 Jl Aip II KS Tubun Raya No.77 Slipi Palmerah, Jakarta Barat	Industri fuel ethanol	Lampung Tengah
30	Indonesia Pelleting, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.13 Tanjungbintang-Lampung Selatan	Industri pakan ternak dan minyak ekstraksi : tapioka pellet dan pakan ternak	Lampung Selatan
31	Inti Sentosa Alam Bahtera, PT.	Jl. Yos Sudarso Pelabuhan Panjang-Bandarlampung	Jasa bongkar muat dan jasa pergudangan	Bandarlampung
32	Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT.	Jl. Ir. Sutami KM. 18 Tanjungbintang-Lampung Selatan	Industri makanan ternak, perternakan ayam; jagung kering	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Kartika Dharma Permai, PT. (Hotel Sahid)	Jl. Yos Sudarso No. 75 Telukbetung-Bandar Lampung	Perhotelan	Bandarlampung
34	Karya Canggih Mandiri Utama, PT.	Jl. KH. A. Dahlan No.200 Pahoman-Bandar Lampung	Perkebunan kelapa sawit : minyak kelapa (TBS), CPO, inti sawit.	Lampung Barat
35	Keong Nusantara Abadi, PT.	Jl. Desa Bumi Sari Kec. Natar-Lampung Selatan	Industri makanan dan minuman dalam kaleng, industri pengharum ruangan	Lampung Selatan
36	Kirim Miwon Foods, PT	Jl. Desa Gunung Pasir Jaya, Sekampung Udik-Lampung Timur	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Lampung Timur
37	Kwarta Sarana Utama, PT.	Jl. Wolter Monginsidi No.70 Bandar Lampung	Perhotelan	Bandarlampung
38	Kyokko Shinju Indonesia, PT.	Cuku Batu, Desa Hurun, Kec. Padang Cermin	Budidaya mutiara	Lampung Selatan
39	Lampung Inter Pertiwi, PT.	Jl. KH. A. Dahlan No.200 Pahoman-Bandar Lampung	Perkebunan kelapa sawit : minyak kelapa (TBS), CPO, inti sawit.	Tulangbawang
40	Mardec Way Kanan, PT.	Jl. Prof. M. Yamin No.23 Rawa Laut-Bandar Lampung	Industri karet remah (<i>crum rubber</i>)	Way Kanan
41	Masula Agung Garbhamas, PT.	Jl. Sultan Agung Tirtayasa, KM.6 Campang Raya-Bandar Lampung	Pembotolan/ pengisian LPG	Bandarlampung
42	Mira Rantih, PT.	Jl. KH. A. Dahlan No.195 Bandar Lampung	Perkebunan coklat & kelapa hybrida : coklat, kopra, biji coklat, CCO, bungkil, <i>coacoal</i> , kelapa, ubi kayu.	Lampung Utara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Multi Breeder Adirama, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.9 Campang Raya, Bandarlampung	Pembibitan ayam	Tanggamus
44	Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya, PT.	Jl. Sukarno Hatta KM 7 Campang Raya Tanjung Karang Timur – Bandarlampung	Industri pengolahan kopi	Bandarlampung
45	Nestle Indonesia, PT.	Jl. Raya Bakauheni Km.13Panjang, Bandar Lampung	Industri pengolahan kopi	Bandarlampung
46	Nusantara Tropical Fruit, PT.	- Jl. KH.M. Salim No.28 Way Lunik Telukbetung-Bandar Lampung - Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu-Lampung Tengah	Perkebunan pisang	Lampung Timur
47	Palm Lampung Persada, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.7 Bandarlampung	Perkebunan kelapa sawit : TBS kelapa sawit, CPO, inti sawit	Way Kanan
48	Parindo Permai, PT.	Jl. Raya Kotabumi Km.35 Kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng-Kabupaten Pesawaran	Industri panel kayu	Lampung Utara
49	Pemuka Sakti Manis Indah, PT.	Kec. Pakuon Ratu Way Kanan	Perkebunan tebu dan pabrik gula	Way Kanan
50	Perkebunan Nusantara VII, PT.	- Jl. P. Jayakarta No.117/A1 Jakarta - Jl. Ki Agus Anang No.2 Panjang-Bandar Lampung	Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya : minyak sawit, inti sawit, <i>crum rubber</i>	Lampung Tengah, Lampung Selatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Phillips Seafood Indonesia, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.7 Bandarlampung	Pengolahan makanan hasil laut	Bandarlampung
52	Prima Langgeng Dian Agung, PT.	Jl. Yos Sudarso No.225 Bumi Waras-Telukbetung Selatan	Jasa angkutan peti kemas	Bandarlampung
53	Santosa Agrindo, PT.	Jl. M. Salim No.24 Panjang-Bandarlampung	Penggemukan sapi potong, pengolahan daging, pembibitan, dan budidaya tenak	Bandarlampung
54	Sari Segar Husada, PT.	Jl. Raya Kalianda KM.16 Tarahan, Bandarlampung.	Desicaet C, CCD, bungkil, kopra, nata de coco, raw nata.	Lampung Selatan
55	Sierad Produce Tbk, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.12 Desa Tanjungbintang-Lampung Selatan	Industri pakan ternak dan pengeringan jagung	Lampung Selatan
56	Sinar Laut, CV.	Soekarno-Hatta KM.6 Bandarlampung	Sabun cuci, CPO	Bandarlampung
57	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, PT.	Desa Tambah Subur Kec Way Bungur, Lampung Timur	Tepung tapioka	Lampung Timur
58	South East Asia Pipe, PT	Desa Sumur Kec. Ketapang-Lampung Selatan	Industri pipa baja las luruh	Lampung Selatan
59	Sumber Indah Perkasa, PT.	Jl. Sultan Agung Tirtayasa No.6 Bandarlampung	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit serta pembangunan tangki penyimpanan/dermaga dan angkutan khusus kelapa sawit.	Tulangbawang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60	Surya Bayu Sakti, PT. (Hotel Sheraton)	Jl. Wolter Monginsidi No.175 Bandarlampung	Perhotelan	Bandarlampung
61	Sweet Indo Lampung, PT.	Jl. Cut Mutia No.52 Bandarlampung	Perkebunan tebu dan industri gula	Tulangbawang
62	Taba Bukit Asam, PT.	Jl. Raya Kalianda KM.14 Panjang - Bandarlampung	Penambangan batubara	Bandarlampung
63	Tanjungenim Lestari, PT.	Jl. Soekarno Hatta Km. 14 Srengsem, Bandar Lampung	Industri bubur kertas	Bandarlampung
64	Teguhwibawa Bhaktipersada, PT.	Jl. Laks. Malahayati No.62C Telukbetung-Bandarlampung	Industri tapioka	Tulangbawang
65	Tekniko Indonesia, PT.	Jl. P. Tirtayasa No.88 Campang Raya-Bandarlampung	Jasa kontraktor di bidang sipil, elektronik, mekanikal dan industri fabrikasi dan pelapisan baja	Bandarlampung
66	Toyota Bio Indonesia, PT.	Jl. Raya Tanjung Bintang Desa Serdang	Industri pakan ternak dan tanaman pangan (palawija)	Lampung Selatan
67	Tunas Baru Lampung, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya : CPO, inti sawit, minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, <i>stearin</i> , FFA, bungkil kelapa.	Lampung Tengah, Bandarlampung
68	Tunas Baru Lampung, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya	Lampung Tengah, Bandarlampung
69	Ve Wong Budi Indonesia, PT.	Jl. Ikan Kakap No.9/12 Telukbetung	Industri MSG	Lampung Tengah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	Wahan Bumi Kencana, PT.	Jl. Ir. Sutami KM.5 No.23 Way Laga, Panjang-Bandarlampung	Eksport	Bandarlampung
71	Way Kandis, PT.	Jl. Hi. Komarudin No.9 Rajabasa Raya-Bandarlampung	<i>Crum rubber</i>	Bandarlampung
72	Wira Tapioka Mandiri, PT.	Jl. Soekarno-Hatta KM.6 No.1 Sukarame-Bandarlampung	Industri tapioka	Lampung Selatan

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Lampung, 2009.

Perkembangan realisasi proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari perusahaan-perusahaan di atas berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 10 dan 11 di bawah ini.

Tabel 10. Perkembangan Realisasi Proyek PMDN di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (s/d Juni 2009).

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (x Rp1.000.000,00)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bandarlampung	37	651.005.664
2	Lampung Selatan	43	3.987.155.430
3	Lampung Tengah	24	1.969.736.720
4	Lampung Utara	15	538.095.606
5	Lampung Barat	1	82.893.345
6	Lampung Timur	6	146.941.633
7	Tulang Bawang	9	1.193.981.030
8	Tanggamus	6	171.381.354
9	Way Kanan	4	355.254.040
10	Metro	1	1.489.414
11	Pesawaran	2	352.823
	Jumlah	148	9.098.287.059

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, 2009.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa perkembangan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri sampai dengan bulan Juni 2009, paling banyak terdapat di Lampung Selatan yaitu sebanyak 43 proyek. Sedangkan daerah yang jumlah proyek penanaman modal dalam negerinya paling sedikit adalah Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro, yaitu sebanyak 1 proyek.

Tabel 11. Perkembangan Realisasi Proyek PMA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (s/d Desember 2009).

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bandarlampung	27	131.930.608
2	Lampung Selatan	13	17.162.833
3	Lampung Tengah	11	329.951.402
4	Lampung Utara	3	4.984.000
5	Lampung Barat	0	0
6	Lampung Timur	3	95.280.443
7	Tulang Bawang	3	49.206.474
8	Tanggamus	2	13.800
9	Way Kanan	1	102.199.905
10	Metro	0	0
11	Pesawaran	0	0
	Jumlah	63	730.729.465

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, 2009.

Sementara itu, perkembangan realisasi proyek penanaman modal asing sebagaimana yang terlihat pada Tabel 11 dapat diidentifikasi bahwa jumlah proyek penanaman modal asing sampai dengan Desember 2009, paling banyak terdapat di Kota Bandarlampung, dengan jumlah proyek sebanyak 27 proyek. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasi, daerah yang paling banyak nilai investasi modal asingnya adalah Kabupaten Lampung Tengah yaitu US\$ 329.951.402 sekalipun jumlah proyeknya hanya 11 proyek.

4.5. Gambaran Umum PT *Gunung Madu Plantations*

4.5.1. Sejarah PT *Gunung Madu Plantations*

PT *Gunung Madu Plantation* (GMP) merupakan perusahaan patungan antara perusahaan swasta asing dan swasta nasional yang berstatus perkebunan tebu modal asing (PMA) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh *Kwok Investment* (Hongkong). Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula. Pendirian PT. *Gunung Madu Plantations* pada tanggal 20 Oktober 1975 ini merupakan kebijakan pemerintah mengembangkan industri gula di luar Jawa untuk meningkatkan produksi gula nasional agar Indonesia menjadi negara yang berswasembada gula. Adanya keterbatasan dana membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang pihak swasta agar ikut melaksanakan pengembangan industri gula ini. Sehingga pada tahun 1976 dibangunlah sebuah pabrik gula sederhana dengan kapasitas 4000 TCD.

Lokasi PT *Gunung Madu Plantations* ini terletak di Gunung Batin, Lampung Tengah, sekitar 90 km arah utara dari ibukota Provinsi Lampung tepatnya pada jalan lintas Sumatera Bagian Timur. Total areal yang dikelola 35.000 ha dengan luas kebun 24.500 ha. Sisanya merupakan jalan, bangunan pabrik, perkantoran, pemukiman, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sungai-sungai, rawa, dan kawasan konservasi. Sarana dan prasarana umum ke lokasi pabrik tersedia dan cukup Lancar. Jaraknya \pm 7 km dari jalan utama. Perkebunan tebu dan pabrik gula merupakan kegiatan yang ramah lingkungan. Hasil samping dan limbahnya mempunyai nilai ekonomis. Limbah pertanian yang berupa sisa-sisa tanaman (pucuk, daun)

dikembalikan ke tanah sebagai mulsa. Limbah pabrik berupa ampas tebu (*bagasse*) digunakan untuk bahan bakar ketel pembangkit tenaga listrik dan bahan pupuk kompos. Sementara blotong (*filter cake*) juga dikembalikan ke kebun sebagai pupuk organik.

Produksi utama PT. GMP berupa gula pasir, rata-rata 200.000 ton/tahun. Sedangkan hasil sampingan berupa molasses rata-rata 75.000 ton/tahun yang dipasarkan di luar negeri yang biasanya digunakan sebagai bahan pakan ternak.

GMP memiliki kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seluas 10 ha untuk memproses limbah cair. Air yang telah bersih dimanfaatkan lagi untuk irigasi tanaman di kebun. Kolam IPAL selama ini juga dimanfaatkan warga untuk rekreasi dan memancing. IPAL GMP sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai IPAL terbaik di Lampung Tengah maupun tingkat Provinsi Lampung.

Bagi masyarakat desa sekitar, keberadaan PT. GMP sangat membantu. Selain menyediakan lapangan kerja, PT. GMP juga sudah banyak membantu pembangunan fasilitas umum desa, seperti balai desa, kantor Dewan Perwakilan Kampung, masjid, pengerasan jalan, gorong-gorong, dan sebagainya.

Setiap kemarau, PT. GMP memberi bantuan air bersih secara cuma-cuma kepada warga desa sekitar. Bukan hanya itu PT. GMP pun sejak tahun 2004 mejadi pusat pelatihan bagi peningkatan mutu guru di Kabupaten Lampung Tengah.

PT. GMP merupakan pionir usaha perkebunan tebu lahan kering. Oleh karena itu, berbagai inovasi dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahap awal, GMP menempuh antara lain pembangunan infrastruktur, teknologi budidaya tebu lahan kering, pelatihan SDM di sisi manajemen dan teknik alih teknologi. Inovasi lanjutan di lini pabrik antara lain efisiensi energi, otomatisasi dan komputerisasi, manajemen lingkungan, pengembangan dan maksimalisasi kapasitas. Saat ini, GMP berhasil memproduksi tebu sebesar 12.000 ton tebu per hari (TCD).

Dalam kiprahnya, GMP mampu mengubah lahan nonproduktif seluas 35.000 hektar (Ha) menjadi lahan perkebunan tebu produktif dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. GMP juga berhasil mendorong berkembangnya industri gula di Lampung.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT GMP menerapkan tata kelola industri yang baik dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hal-hal yang ditempuh antara lain perbaikan teknik budidaya dengan aplikasi ZPK (zat pemacu kemasakan) yang dapat meningkatkan rendemen 1 poin. Aplikasi ini juga mampu menstabilkan rendemen di sepanjang musim giling.

Selain itu, GMP telah menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melakukan kemitraan tebu rakyat. GMP menilai keikutsertaan masyarakat sekitar untuk ikut menanam tebu merupakan respon terhadap imbauan dan tekanan pemerintah yang kian kuat untuk pengembangan daerah.

Topografi di wilayah perusahaan ini pada umumnya datar. Sepanjang bentang darat dijumpai adanya lebung yang potensial sebagai tandon air dan beberapa sungai cukup besar melintas di wilayah timur. Jenis tanah termasuk ultisol (podsolik merah kuning) dengan lapisan *top soil* sangat tipis. Sifat fisik dan kimia tanah mengharuskan diterapkannya teknologi budidaya yang tepat dan bijaksana. Curah hujan tahunan sekitar 2.700 mm. Musim tebang dan giling dilaksanakan dari bulan April sampai Oktober, bersamaan dengan periode yang relatif kering.

Musim tebang dan giling pertama dilaksanakan tahun 1978. Pabrik mengikuti proses sulfitasi ganda untuk menghasilkan gula SHS. Kapasitas giling terpasang mula-mula sebesar 4.000 TCD (ton tebu per hari), kemudian mulai tahun 1994 diperbesar secara bertahap menjadi 12.000 TCD. Sejak 2007 mulai dikembangkan lagi menuju 16.000 TCD.

Teknologi maju diterapkan di kebun dan di pabrik, termasuk pemanfaatan alat mesin pertanian secara luas serta otomatisasi di beberapa stasiun di pabrik. Sekalipun demikian sejumlah 8.000 – 10.000 pekerja tetap terserap setiap harinya selama musim tebang dan giling. Tingkat produksi kini mencapai rata-rata 2 juta ton tebu dan sekitar 190.000 ton gula per tahun. Kualitas gula secara rutin diuji dan disertifikasi oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebagai laboratorium Komite Akreditasi Nasional.

Gula Gunung Madu dipasarkan di kawasan Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu), DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hasil

samping (*co product*) berupa tetes (*molasses*) dijual langsung ke sektor industri hilir dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tetes merupakan bahan baku etanol, monosodium glutamat (MSG), pelet, kecap, dan lysin. Sebagian besar tetes diekspor ke Thailand, Taiwan, Jepang, dan Uni Eropa. Sebagian lagi dibeli industri pakan ternak di dalam negeri.

4.5.2. Visi dan Misi PT *Gunung Madu Plantations*

Dalam kiprahnya, PT. *Gunung Madu Plantations* memiliki visi yaitu “ Menjadi produsen gula yang paling efisien di ASEAN dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan menciptakan peluang usaha yang berbasis pertanian serta pengembangan produksi/diversifikasi”. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi yang dijalankan oleh PT. *Gunung Madu Plantation* antara lain :

1. Meningkatkan terwujudnya swasembada gula nasional melalui penerapan teknologi yang inovatif;
2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
3. Membantu meningkatkan pengembangan daerah sekitar;
4. Meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Pada PT. *Gunung Madu Plantations*, ada beberapa budaya yang memiliki nilai integritas yaitu :

- a) Integritas;
- b) Profesionalisme;
- c) Produktivitas dan efisiensi;

d) Kestinambungan.

Nilai-nilai inti tersebut menjadi landasan bagi visi perusahaan seraya terus mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara luas dengan tetap berlandaskan asas keberlanjutan.

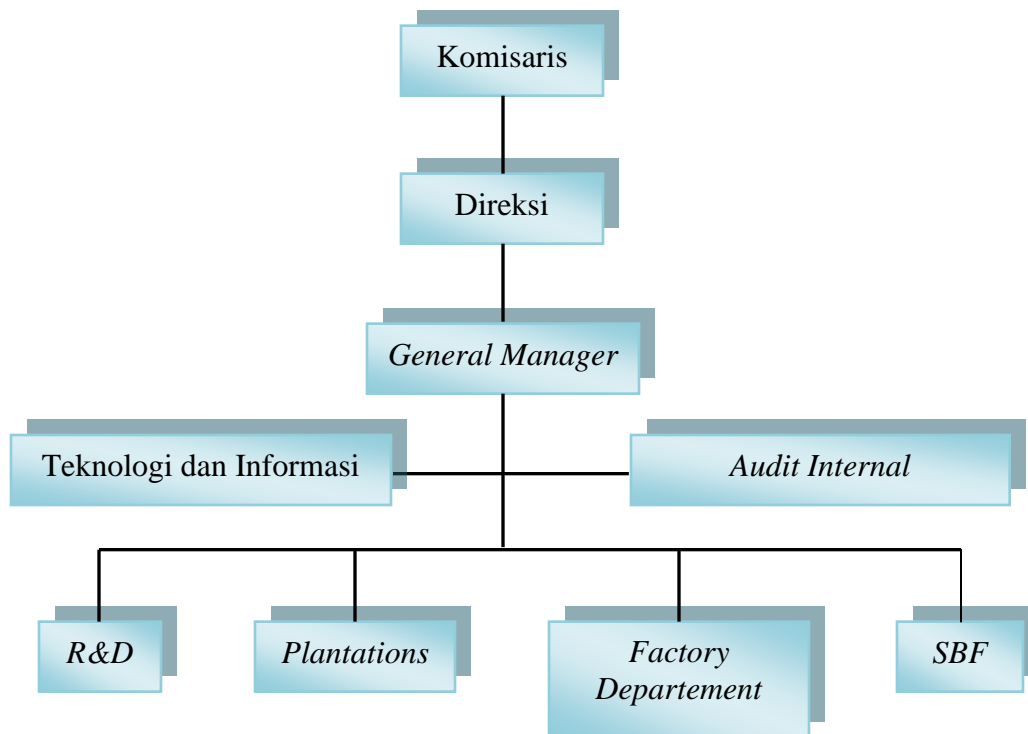
Sementara itu catur-misi perusahaan adalah mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional menuju swasembada, meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, ikut mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, serta mempertahankan keuntungan para pemegang saham.

Terdapat benang merah antara nilai-nilai inti, visi, dan misi perusahaan. Perusahaan *Gunung Madu Plantations* bertekad menjadi suatu perusahaan agro-industri yang *sustainable* dari aspek ekonomi dan ekologi, sekaligus mampu memberi manfaat secara sosial.

4.5.3. Struktur Organisasi PT *Gunung Madu Plantations*

Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, per departemen organisasi kedudukan dan jenis wewenang penjabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2001) Struktur organisasi PT. Gunung Madu Plantations tergolong pada tipe lini (*lini organization*). Dalam organisasi lini ini, pendelegasian wewenang dilakukan secara vertical melalui garis terpendek dari Pimpinan PT. *Gunung Madu Plantations* kepada setiap staf dan karyawan yang

berada pada jabatan terendah. Setiap kepala departemen mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pekerjaannya kepada kepala bidang yang berada pada satu tingkat di atasnya. Hal ini dapat dilihat dari bagan struktur di bawah ini.



Bagan 4. Struktur Organisasi PT Gunung Madu Plantations

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian struktur organisasi pada PT *Gunung Madu Plantations* :

1. Komisaris

Komisaris mempunyai wewenang dalam menentukan kegiatan operasional perusahaan serta semua kegiatan dan perencanaan perusahaan.

2. Direksi

Direksi bertugas mengendalikan semua kegiatan yang telah ditentukan komisaris.

3. *General Manager*

General Manager bertugas mengawasi semua kegiatan perusahaan mencakup kegiatan produksi, *finishing*, *accounting*, pemasaran, dan administrasi.

4. Teknologi dan Informasi

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada setiap unit alat kerja sesuai dengan waktu yang diberikan, membangun komunikasi yang cepat, bersifat timbal-balik atau partisipatif; *up to date*, dan langsung dengan semua pihak, antar jajaran manajemen, staf, karyawan serta seluruh insan manusia yang ingin mengetahui lebih dalam tentang PT GMP.

5. Audit Internal

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, melakukan audit atas *System Operation Procedure* (SOP) yang berlaku, dan memberikan saran/perbaikan sehubungan dengan perbaikan kinerja dari pihak yang diaudit.

6. *Departement Research dan Development*

Bertanggung jawab dalam penelitian dan pengembangan pada kebun dan pabrik. Misalnya mendapatkan varietas unggul, perlindungan terhadap hama dan penyakit, bobot dan tinggi tebu, mengurangi tingkat kehilangan glukosa dalam tebu-tebu lain.

7. *Departement Plantations*

Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari pembukaan lahan, penyiapan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan dan pengangkutan tebu ke lokasi pabrik.

8. *Departemen Factory*

Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari pembukaan lahan, penyiapan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan dan pengangkutan tebu ke lokasi pabrik.

9. *Departement Service Business dan Finance*

Bertugas melaksanakan kegiatan penggudangan, penjualan, pembelian barang-barang yang dibutuhkan, pembukuan, kepegawaian, kesehatan dan keamanan.